

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN
(Suatu Studi di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur Kota
Kotamobagu)

Oleh

RETNO ISTYKHOMAH

Abstract

Poverty in Indonesia is an evidence and also as a valuable lesson that top-down policies is not good absolutely for the Indonesia people . Everything which is not open forcreativities will influence in high dependency , creating weakness and, blunting creativity .

National Program for Community Empowerment comes as a solution from thegovernment to empower communities by maximizing and optimizing capital - social capital in the community such as mutual cooperation , togetherness , solidarity , and cooperation as the cornerstone of any poverty alleviation program that will be implemented .

In this case , the PNPM believes that a more effective approach to realize the process of behavioral change is through a community empowerment approach and strengthening the role of local government in appreciating and supporting the independence of its people . Empowerment process is done by constantly striving to develop a critical awareness of the community towards universal human values , social principles and the principles of sustainable development as a solid foundation to build an independent and prosperous society . The learning process takes place at the community level during the program and post- program by the community itself by building and institutionalizing District LearningCommunity (DLC).

Keyword : *poverty , PNPM Mandiri , process .*

PENDAHULUAN

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat parsial serta sektoral dalam kenyataannya justru sering menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial, dan melemahkan kapital sosial yang ada di masyarakat seperti gotong royong, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dll. Lemahnya capital sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi permasalahan secara bersama.

Kondisi kapital sosial masyarakat yang melemah serta memudar itu salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggungjawab. Sehingga menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian, dan skeptisme di masyarakat. Hal ini dapat kita lihat beberapa waktu lalu saat pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) masyarakat saling berdesak-desakan untuk mendapatkan bantuan yang telah dijanjikan, bahkan tidak sedikit yang terinjak-injak dan akhirnya jatuh pingsan. Belum selesai dengan persoalan pembagian bantuan, pemerintah dihadapkan pada permasalahan lain yaitu tidak meratanya jumlah masyarakat miskin yang mendapatkan BLT.

Kondisi kelembagaan pimpinan masyarakat yang tidak mengakar dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam situasi dimana masyarakat secara umum memang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada gilirannya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan, dan kejujuran.

Menurut lester dan Stewart Jr (2000) bahwa implementasi sebagai proses dan suatu hasil; keberhasilan suatu implementasi diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai

Selama ini semua kebijakan pembangunan baik sosial, politik, dan terutama ekonomi adalah bersifat top down. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat adalah bukti dari lemahnya ekonomi rakyat. Kebijakan pembangunan yang bertahun-tahun berlangsung secara top down menciptakan ketergantungan yang tinggi dari public terhadap pemerintahnya. Basis kekuatan ekonomi bukan berada pada aktivitas ekonomi rakyatnya, tetapi berada pada kekuatan dan selera pemerintah yang amat dominan.

Kemiskinan yang dialami Indonesia merupakan sebuah bukti dan pelajaran berharga bahwa betapa pola kebijakan yang bersifat top down berakibat sangat tidak baik bagi masyarakat. Segala sesuatu yang tidak membuka ruang kreativitas akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi, menciptakan kelemahan, serta menumpulkan kreativitas.

Dari gambaran yang ada serta dari berbagai pengalaman atas kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah diterapkan, pemerintah pada tahun 1999 mencanangkan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (secara generic disebut Badan atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM/LKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

Kelurahan Matali sebagai salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Kotamobagu Timur juga melaksanakan Program PNPM Mandiri Perkotaan tersebut. Ini dikarenakan semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kotamobagu Timur mendapatkan program tersebut. Juga masih terdapat di kelurahan tersebut para warga miskin yang perlu mendapat bantuan dari pihak luar untuk membantu mensejahterakan kehidupan mereka.

Sejak diterapkannya program PNPM Mandiri Perkotaan di kelurahan ini, PNPM Mandiri sudah banyak membantu para warga miskin. Walau begitu, para pelaku program ini masih diperhadapkan pada beberapa masalah atau kendala seperti masih adanya masyarakat yang enggan untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Diduga daftar masyarakat penerima manfaat hanya berdasarkan hubungan kekerabatan. Program yang dilaksanakan benarkah sudah sesuai dengan pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan waktu pelaksanaannya benarkah sudah sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ialah metode deskriptif, yaitu suatu penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan menggambarkan suatu fenomena tertentu (Singarimbun dan Effendy, 1992; Arikunto, 2000). Dalam penelitian ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Arikunto (2000), bahwa penelitian deskriptif biasanya merupakan penelitian nonhipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis.

B. Operasionalisasi Variabel

Variabel yang diamati dari penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu implementasi kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dengan melihat ketepatan waktu pelaksanaan, pelaksanaan dari program-program yang telah ditetapkan sebelumnya dan manfaat dari pelaksanaan program/kebijakan tersebut untuk masyarakat disekitarnya.

C. Jenis dan Sumber Data/Informan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan focus penelitian yaitu implementasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan public. Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen pada kantor lokasi penelitian yaitu di kantor Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kel. Matali.

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*key instrument*), sedangkan teknik pengumpulan data (data primer) yang digunakan ialah sebagai berikut:

1) Kuisisioner (*Quotionaire*)

Kuisisioner atau daftar pertanyaan sebagai urutan pengumpul data primer yang tidak dijaring melalui teknik wawancara. Kuisisioner disusun untuk membantu peneliti dalam menjaring data yang lolos melalui teknik wawancara dan observasi.

2) Observasi.

Observasi dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, dengan maksud memperoleh gambaran empiric pada hasil temuan. Hasil observasi ini dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada.

3) Wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap informan yang telah ditentukan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian, juga untuk merespon berbagai pendapat untuk meningkatkan kinerja organisasi yang akan datang. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang berhubungan dengan implementasi kebijakan PNPM Mandiri. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, disertai dengan wawancara bebas.

4) Studi Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Data sekunder ini diambil pada dokumen-dokumen tertulis diinstansi-instansi terkait.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif-kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut (Arikunto, 2000):

- a. Tabulasi data dan analisis data. Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif yaitu data yang digambarkan dengan kata-kata dan kalimat. Dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan data yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berwujud angka-angka hasil perhitungan tabulasi data diproses dengan cara mengklasifikasikan menurut kategori, dijumlahkan dan kemudian dihitung persentasenya. Hasil perhitungan ini disajikan dalam bentuk table-tabel distribusi frekuensi dan persentase.
- b. Interpretasi hasil analisis data, yaitu membuat penafsiran dan interpretasi terhadap hasil analisis data dengan kalimat atau secara kualitatif.
- c. Penyimpulan, yaitu membuat kesimpulan terhadap hasil analisis dan interpretasi data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kesesuaian dengan Prosedur Pelaksanaan.

Berikut ini akan disajikan data tentang kesesuaian dengan prosedur pelaksanaan yang telah tertulis di Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Kesesuaian Prosedur Pelaksanaan.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	29	99,00
2	Sedang	0	0,00
3	Rendah	1	1,00
	Jumlah	30	100,00

Dari hasil tabulasi data diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden yang dimintai keterangannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ternyata 99% responden menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang sudah ditetapkan, sedangkan 1% responden menyatakan bahwa program yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan.

b. Ketepatan Waktu Pelaksanaan.

Setiap program yang telah direncanakan terdapat target waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam Perencanaan Jangka Menengah. Berikut ini akan disajikan tentang ketepatan waktu pelaksanaan program.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Ketepatan Waktu Pelaksanaan.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	29	99,00
2	Sedang	0	0,00
3	Rendah	1	1,00
	Jumlah	30	100,00

Dari hasil tabulasi data diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden yang dimintai keterangannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ternyata 99% responden menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah

sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan, sedangkan 1% responden menyatakan bahwa program yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

c. Indikator Ketepatan Jumlah Pencairan Dan

Setiap program yang telah direncanakan disertakan dengan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut, berikut ini adalah sajian data tentang ketepatan jumlah pencairan dana.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Ketepatan Jumlah Pencairan Dana.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	29	99,00
2	Sedang	0	0,00
3	Rendah	1	1,00
	Jumlah	30	100,00

Dari hasil tabulasi data diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden yang diminta keterangannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ternyata 99% responden menyatakan bahwa dana yang dicairkan sudah sesuai dengan rencana anggaran yang sudah ditetapkan sedangkan 1% responden menyatakan bahwa jumlah dana yang dicairkan tidak sesuai dengan anggaran.

d. Ketepatan Pemanfaatan Dana

Dana yang telah dicairkan kemudian dilihat dari pemanfaatannya, apakah sudah tepat sasaran atau belum. Berikut ini adalah sajian data tentang ketepatan pemanfaatan dana.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Ketepatan Pemanfaatan Dana.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	29	99,00
2	Sedang	0	0,00
3	Rendah	1	1,00
	Jumlah	30	100,00

Dari hasil tabulasi data diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden yang dimintai keterangannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ternyata 99% responden menyatakan bahwa dana yang dicairkan sudah tepat dalam pemanfaatannya sedangkan 1% menyatakan bahwa dana yang dicairkan tidak tepat dalam pemanfaatannya.

e. Ketepatan Alokasi Program

Program-program yang dilaksanakan seharusnya sesuai dengan alokasi yang ditetapkan sebelumnya yaitu harus bermanfaat untuk warga miskin yang membutuhkan bantuan. Berikut ini adalah sajian data tentang ketepatan alokasi program.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Ketepatan Alokasi Program.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Tinggi	29	99,00
2	Sedang	0	0,00
3	Rendah	1	1,00
	Jumlah	30	100,00

Dari hasil tabulasi data diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden yang dimintai keterangannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ternyata 99% responden menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah tepat dalam pengalokasiannya sedangkan 1% responden menyatakan program yang dilaksanakan tidak tepat dalam pengalokasiannya.

2. PEMBAHASAN

Implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur diamati melalui 5 (lima) indikator yaitu: kesesuaian dengan prosedur pelaksanaan, ketepatan waktu pelaksanaan program PNPM Mandiri, ketepatan jumlah pencairan dana terhadap kebutuhan program, ketepatan pemanfaatan dana, dan ketepatan alokasi program. Untuk mendapatkan hasil dari data tersebut telah disusun kuesioner yang terdiri dari 18 (delapan belas) pertanyaan. Jumlah kuisisioner yang dibagikan sebanyak 30 (tiga puluh) kuisisioner, dimana semua masyarakat yang terlibat

dalam kegiatan PNPM Mandiri menjadi respondennya. Setiap pertanyaan dalam kuisisioner terdapat lima opsi atau alternatif jawaban yang diberi nilai/score tertinggi/ideal adalah $5 \times 18 = 90$.

Berdasarkan hasil tabulasi data kemudian ditetapkan sebanyak tiga tingkatan atau banyak kelas interval dari variabel implementasi kebijakan ini yaitu : “baik”, “kurang baik”, dan “tidak baik”. Sesuai dengan banyaknya kategori tersebut maka ditetapkan panjang kelas interval atau rentang score untuk setiap kategori yaitu dengan cara membagi rentang score tertinggi dan terendah hasil tabulasi data dengan banyaknya tingkat/kelas interval. Dari tabulasi data didapat total score tertinggi mengenai implementasi kebijakan adalah 82 dan terendah 34, sehingga rentang score tertinggi-terendah adalah $82 - 34 = 48$. Dengan demikian panjang kelas interval atau rentang score untuk setiap kategori pengukuran/penilaian implementasi kebijakan adalah $48 : 3 = 16$. Berdasarkan cara perhitungan tersebut maka rentang score untuk setiap kategori tingkat implementasi PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

Kategori “baik”: score 82 s/d 67

Kategori “kurang baik”: score 66s/d51

Kategori “tidak baik”: score 50 s/d 34

Sesuai dengan kategorisasinya yang telah ditetapkan tentang penyajian tabel distribusi frekuensi yang pengolahannya didasarkan pada hasil tabulasi data hasil penelitian, maka dapat disajikan rekapitulasi tanggapan responden terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur.

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Matali Kecamatan Kotamobagu Timur.

No	Kategori	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Baik	29	99,00
2	Kurang Baik	0	3,00
3	Tidak Baik	1	1,00
	Jumlah	30	100,00

Dari hasil tabulasi data diatas menunjukkan bahwa dari 30 orang responden yang dimintai keterangannya tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ternyata 96% responden menyatakan bahwa PNPM Mandiri sudah

baik dan sudah bermanfaat dalam pelaksanaannya, sedangkan 1% responden menyatakan bahwa PNPM Mandiri tidak baik dan tidak bermanfaat dalam pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari implementasinya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam kesesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan sudah sesuai berdasarkan program-program yang telah dilaksanakan.
2. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dinilai sudah cukup tepat waktu.
3. Dilihat dari ketepatan pemanfaatan dana yang dicairkan, dana yang dicairkan sudah tepat dalam.
4. Alokasi ketepatan program juga menilai sudah baik. Masih ada beberapa unsur warga yang merasa kurang dilibatkan dalam setiap proses Program PNPM Mandiri, dari segi manfaat program maupun kontribusi.
5. Dilihat dari semua indikator yang digunakan menunjukkan bahwa implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Kelurahan Matali sudah baik.

B. Saran

Bertitik tolak dari hasil penelitian, maka perlu disarankan beberapa hal yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya masyarakat berperan aktif dalam proses kegiatan yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan karena masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat dalam proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan.
2. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, hendaknya para pelaku PNPM Mandiri Perkotaan dan Pemerintah Lokal semakin proaktif dalam merangkul warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga nantinya program yang akan disusun tepat pada sasaran yakni warga miskin yang ada di Kelurahan Matali.

3. Kiranya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan ini terus berlanjut dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Kelurahan Matali karena PNPM Mandiri Perkotaan merupakan program yang sangat baik karena selain ditujukan untuk masyarakat miskin, melalui program ini masyarakat diberdayakan untuk menjadi masyarakat yang mandiri yang tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulwahab, 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008. *Intervensi Komunitas (Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S, 2000, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, W. N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Gie, The Liang, dkk, 1982. *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Islamy, M, I, 2005, *kebijakan Publik*, Model-UT, Jakarta : Karunika-UT
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumanegara, S. 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Mokoginta, H. 1996, *Studi Implementasi Program dan Proyek Pembangunan*, Bahan Ajar, Manado, FISIP Unsrat.
- Moleong, L. J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Singarimbun, M dan S. Effendi. 1992. *Metode Penelitian Survey Cetakan I*. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Sumber-sumber lain :

Informasi Dasar untuk Fasilitator Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan No.25/KEP/MENKO/KESRA/V II/2007 tentang Pedoman Umum PNPM Mandiri

Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM-Pronangkis)

LKM Bintang Mas Kel. Matali

Peraturan Presiden Nomor. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.